



KAPOLRI BARU TAK ANTI KRITIK

Jakarta | **Harian Merdeka** – Calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Komjen Pol. Suyudi Ario Seto mengatakan kritik berbasis fakta dari masyarakat merupakan sistem peringatan dini bagi Polri untuk mengetahui berbagai hal yang perlu segera diperbaiki.

Halaman 11

NASIONAL

BGN: Insentif
SPPG MBG
Rp 2.000
per Porsi

Halaman 2

PARLEMEN

Rieke Ungkap
Masalah Lapas
Cibinong:
Barang Bukti
dan Overkapasitas

Halaman 4

SPORT

Emas
Kelima

Halaman 12

Qodari Minta Maaf Imbas Sorotan Gaya Hidup Mewah Pejabat Bakom

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), M. Qodari, meminta maaf atas kelalaiannya mengingatkan jajaran Bakom soal gaya hidup mewah, menyusul sorotan publik terhadap pameran kemewahan pejabat di lembaganya. Ia mengaku sudah menegur keras Deputy II Bakom, Timothy Ivan, yang menjadi sorotan di media sosial karena gaya hidupnya.



Permintaan maaf itu disampaikan Qodari dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu, (30/9/2026).

“Untuk kelalaian mengingatkan Deputy dan jajaran Bakom tentang gaya hidup mewah, saya sebagai Kabakom meminta maaf. Saya sebagai pribadi meminta maaf dan akan terus memperbaiki diri di masa depan,” kata Qodari.

Qodari mengatakan teguran juga ia sampaikan kepada deputy lain. Selain Timothy Ivan, ia mengingatkan Deputy I Bakom, Fahd Pahdepie, dan seluruh deputy agar membatasi diri.

Patut saya sampaikan bahwa saya sudah menegur keras saudara Timothy Ivan dan mengingatkan Fahd dan semua Deputy Bakom untuk lebih membatasi diri, tidak mengekspos apa yang disebut gaya hidup mewah, serta berhati-hati dalam menggunakan medsos,” ujar Qodari.

Dalam pernyataan resminya, Qodari menyebut sikap itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, standar tersebut berlaku bagi seluruh jajaran pemerintah dan ia tekankan kepada setiap pejabat di Bakom.

“Arahan Bapak Presiden adalah agar pejabat hidup sederhana dan peka terhadap keadaan masyarakat,” tutur Qodari.

Qodari lalu mengingatkan contoh yang pernah ia berikan saat bertugas di Kantor Staf Presiden (KSP). Di depan wartawan, ia mengaku memakai arloji Seiko dalam kegiatan sehari-hari. ● (Egi)



BGN: Insentif SPPG MBG Rp 2.000 per Porsi

JAKARTA |
Harian Merdeka

Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengubah insentif program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari Rp 6 juta per hari menjadi Rp 2 ribu per porsi.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional tentang Besaran Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang berlaku efektif 5 Oktober 2026.

Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan perubahan besaran insentif SPPG ini mengedepankan asas kewajaran, keadilan, dan efisien. Nantinya besaran insentif yang diterima SPPG tergantung pada

jumlah penerima manfaat MBG.

“Sebelumnya masing-masing SPPG itu kemudian memberikan layanan MBG dengan jumlah penerima manfaat yang berbeda-beda, namun kemudian mendapatkan insentif yang sama, yaitu Rp 6 juta per hari, itu kemudian kami sesuaikan sesuai dengan proporsionalnya, yaitu kami kembalikan menjadi Rp 2.000 per porsi makanan yang dibagikan ke penerima manfaat,” ungkapnya dalam unggahan Instagram pribadi @sudaru_sudaryono, dikutip Kamis (1/10/2026).

Sudaryono mengatakan, insentif hanya diberikan kepada SPPG yang tetap beroperasi. SPPG yang disuspensi atau tidak beroperasi karena sekolah libur nasional maupun kondisi tertentu, sep-

erti bencana, tidak akan menerima insentif.

“Dapur SPPG itu tidak melayani penerima manfaat dalam memberikan MBG, sehingga insentif juga tidak diberikan,” jelasnya.

Sudaryono menjelaskan, insentif SPPG merupakan bagian dari total anggaran MBG sebesar Rp 15.000 per porsi. Rinciannya, Rp 10.000 untuk makanan, Rp 3.000 untuk operasional, dan Rp 2.000 sebagai insentif bagi SPPG.

“Rp 2.000 ini adalah bagian dari Rp 15.000 per porsi yang diberikan kepada setiap penerima manfaat, yang terdiri dari Rp 10.000 untuk makanan yang diberikan kepada penerima manfaat, Rp 3.000 untuk operasional, dan Rp 2.000 adalah insentif,” pungkasnya.

● (Egi)

Redaksi **MERDEKA**

Diterbitkan Oleh : PT.JAKARTA RAYA PERS

Pemimpin Umum : Helmy Halim, Pemimpin Perusahaan : Alan Oskar, Wakil Pemimpin Perusahaan : Verencia Mercy, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Helmy Halim, Wakil Pemimpin Redaksi : Abdul Rohman, Redaktur Eksekutif : Egi Hendrawan, Redaktur Pelaksana : Agus Irawan, Redaktur : Andri Achdiat, Budi Santoso, Taufik, Saepudin, Adam Kamal, Reporter : Aceng Abidin, Ahmad Baladi, Sahrul, Robi Liu, Prayitno, Edi.ST, Nurziman, Rafiudin, Abdul Aziz, Siti Marko, RA. Sudrajat, Syarif Hidayat, Irwani Heliawan, Abidin, Hasuri, Mukhtar, Jan Zarian, Juli Rabiati, H. Mulyadi, Didit, Daenk, Ali.R., Kabirot Medan : Umar, S.Pd.I Perwakilan Nias (Sumut) Adi Laoli, Sekretaris Redaksi : Syafina Azzahra, Keuangan : Yosefin Arwinda Devi, Manager Iklan : Muksin, P.Adi, Iklan : S Fajar, Wilki Irawan, Pemasaran : Hendro, Anwar, Saunan, Agus Black, Dian, Layout : Bobby Saputra, Fuad, IT Web : Walid, Amel, Bagian Umum/OB : Wawan, Penasehat Hukum : Hanafi Tanawijaya. SH, Dedi Suryadi. SH

Kantor Usaha/Redaksi : Rukan Golden Fatmawati, Jl.RS Fatmawati G-34 No.15 RT.008 RW.006, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. NO. REK. BANK MANDIRI KCP JAKARTA KEMENDIKBUD 1220011807917 a/n JAKARTA RAYA PERS.Telp: 081212262686

Kantor Perwakilan : Ruko ModernLand Blok R 30, Jalan Hartono Raya Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Telepon : (021) 59728637. (isi di luar tanggungjawab percetakan)

Prabowo Akan Beri Bantuan Upah ke 13,3 Juta Pekerja

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu, membahas sejumlah program bantuan yang disiapkan oleh pemerintah untuk disalurkan kepada masyarakat sepanjang Kuartal IV/2026 atau sampai dengan akhir tahun 2026.

Bantuan-bantuan tersebut mencakup bantuan beras 10 kilogram untuk 3 bulan yang diberikan satu kali mulai bulan Oktober 2026, kemudian pembukaan rekening warga negara di atas 17 tahun untuk mereka yang berasal dari kategori Desil 1 (miskin ekstrem) hingga Desil 4 (rentan miskin), dan terakhir subsidi upah yang diberikan sebanyak satu kali untuk tiga bulan.

“Hari ini rapat dengan Bapak Presiden terkait dengan program-program, bantuan pemerintah yang disiapkan untuk Kuartal IV, jadi, tadi dibahas

program untuk Kuartal IV, antara lain pembukaan rekening kepada warga negara yang di atas 17 tahun, dan diarahkan pada Desil 1 sampai dengan Desil 4. Nanti angkanya sedang di cross check dengan kementerian terkait,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan isi rapat dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu malam.

Airlangga melanjutkan bantuan kedua, yaitu bantuan pangan yang akan diberikan kepada 33.244.408 keluarga penerima manfaat.

“Yang kedua, konfirmasi bantuan pangan yang besarnya 10 kilogram untuk 3 bulan, dan

nanti akan diserahkan satu kali untuk Oktober dan Desember, dan ini diberikan kepada 33.244.408 keluarga penerima manfaat. Ini desilnya 1 sampai 4,” ujar Airlangga.

Ia melanjutkan besaran anggaran yang dialokasikan untuk bantuan pangan tersebut kurang lebih sebesar Rp17,5 triliun.

Bantuan ketiga, Airlangga menyampaikan, pemerintah mempersiapkan kembali subsidi upah untuk disalurkan pada Kuartal IV/2026.

“Pemerintah akan memberikan lagi bantuan subsidi upah, di mana bantuan subsidi upah ini diberikan satu kali untuk tiga bulan, dan per bulannya sebesar

Rp300.000, dan ini diberikan kepada 13,3 juta pekerja,” kata Airlangga. Dia menambahkan kebutuhan anggaran untuk subsidi upah itu hampir mencapai Rp12 triliun.

Rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu sore, diikuti oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, CTO Danantara Sigit Puja Santosa, Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria, dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara. ● (Egi)



Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Mendagri Fokus Agen Perlinsos

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong perluasan agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) agar penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran. Agen Perlinsos merupakan relawan atau pendamping yang membantu masyarakat di lingkungan sekitarnya dalam mengakses layanan Perlinsos Digital, terutama bagi keluarga, tetangga, atau warga yang mengalami kesulitan.

Menurut Mendagri, keberadaan agen Perlinsos menjadi bagian penting dalam mempercepat proses validasi, terutama bagi masyarakat yang memiliki



keterbatasan akses atau kemampuan menggunakan perangkat digital. Hal itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Tingkat Menteri Pembahasan Perluasan Perlinsos dan Rencana Implementasi Tahun 2027 di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sos-

ial, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

“Perlu dibantu oleh orang lain yang kita sebut dengan agen. Agen inilah kemudian dilatih, dan kemudian mereka men-download menggunakan handphone yang memang smartphone. Dan ini kecepatannya sangat tinggi sekali karena hanya lima sampai tujuh detik saja, begitu wajahnya ditampilkan, kemudian data di Dukcapil langsung [muncul],” katanya.

Dalam mekanisme tersebut, data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menjadi basis data utama karena memiliki data biometrik, seperti sidik jari, wajah (face recognition), hingga retina. Data tersebut memungkinkan proses validasi dilakukan

dalam hitungan detik sekaligus membantu memperbarui data penerima bansos secara berkala.

“Data Dukcapil sebagai basis data untuk verifikasi, validasi, kemudian juga mengintegrasikan beberapa kementerian lain, data kementerian/lembaga lain,” ujarnya.

Data Dukcapil tersebut selanjutnya diintegrasikan dengan data dari kementerian/lembaga lain untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi penerima bantuan. Mendagri mencontohkan integrasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengetahui kepemilikan tanah dan dengan kepolisian untuk mengetahui kepemilikan kendaraan. ● (Agus)



DPR: Transportasi Antarpulau Perlu Jadi Pelayanan Dasar

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Anggota DPR RI Hendry Munief menilai transportasi antarpulau perlu dipandang pemerintah dan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pelayanan dasar bagi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan.

“Transportasi antarpulau perlu dilihat sebagai pelayanan dasar wilayah,” kata Hendry yang merupakan anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (30/9).

Menurut Hendry, bagi masyarakat di wilayah kepulauan, keberadaan transportasi antarpulau sangat menentukan kemudahan dalam memperoleh akses terhadap berbagai kebutuhan kehidupan. Karena itu, transportasi antarpulau, kata dia, tidak semestinya hanya dipandang sebagai proyek pembangunan infrastruktur. Layanan tersebut harus menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan masyarakat kepulauan memperoleh pelayanan yang setara dengan masyarakat di wilayah daratan.

“Ketika transportasi terbatas, maka akses terhadap pendidikan, kesehatan, energi, dan perdagangan juga ikut terdampak,” ujarnya.

Hendry menambahkan, keterbatasan transportasi juga berdampak terhadap distribusi barang ke wilayah kepulauan. Biaya distribusi yang semakin tinggi pada akhirnya dapat memengaruhi harga berbagai kebutuhan masyarakat.

“Dengan demikian, konektivitas harus menjadi bagian dari kebijakan afirmatif untuk daerah kepulauan,” tegasnya.

Ia mengatakan RUU Daerah Kepulauan perlu memberikan ruang bagi penerapan skema layanan transportasi yang disesuaikan dengan karakter geografis masing-masing wilayah.

Menurutnya, pemerintah dapat mendorong layanan melalui trayek perintis, pemberian subsidi dengan skema public service obligation (PSO), serta penerapan standar pelayanan minimum. Skema tersebut dinilai penting terutama untuk rute-rute antarpulau yang secara komersial belum tentu menarik bagi operator, tetapi memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga konektivitas wilayah. **(hmi)**

Rieke Ungkap Masalah Lapas Cibinong: Barang Bukti dan Overkapasitas



JAKARTA |
Harian Merdeka

Komisi XIII DPR RI meminta isi properti dalam hunian mewah Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, dicatat untuk proses penyidikan selanjutnya.

Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi XIII Rieke Diah Pitaloka saat kunjungan kerja DPR ke Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, pada Rabu (30/9).

“Kita harus memastikan bahwa semua barang yang dikeluarkan ini sudah tercatat, sudah terinventarisir dengan baik. Karena ini sedang dalam proses penyidikan,” kata Rieke di hadapan wartawan pada Rabu (30/9).

Ia menyebut temuan hunian mewah di Lapas Cibinong masih dalam proses penyidikan, seluruh barang harus dicatat

tanpa terkecuali.

“Semua barang dalam proses penyidikan itu bahkan tidak asal bongkar, tapi juga harus barang sekecil apapun tercatat terinventarisir,” ujarnya.

Rieke mengaku sudah mendapat jaminan bahwa barang-barang yang ada di dalam rumah mewah tersebut sudah tercatat dan sedang dalam proses investigasi.

“Tapi kita sudah mendapatkan jaminan barang-barang ini sudah terinventarisir sebagai barang dalam proses investigasi,” kata Rieke.

Sebelum pembongkaran, Rieke bersikeras untuk melakukan pencatatan terhadap barang-barang di dalam rumah mewah. Politikus PDI Perjuangan tersebut meminta pembongkaran jan-

“Kita harus memastikan bahwa semua barang yang dikeluarkan ini sudah tercatat, sudah terinventarisir dengan baik. Karena ini sedang dalam proses penyidikan,”

Rieke Diah Pitaloka
Anggota Komisi XIII

gan sampai menghilangkan barang bukti berupa fasilitas di dalamnya.

“Kalau mau dibongkar silakan saja, tetapi dengan syarat semua bukti fisik, aset, sofa, TV, layar lebar, dan kulkas harus dipotret, dicatat, dan disegel terlebih dahulu,” kata Rieke.

“Pembongkaran prematur tanpa pencatatan dapat dikategorikan sebagai penghilangan barang bukti,” sambungnya.

(hmi)

Jokowi Pamer KTA PSI di Bandung, Hensa: Pesannya Jelas, Saya Ada di Kandang Prabowo

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Pengamat politik sekaligus Founder Lembaga Survei Kedai-KOPI, Hendri Satrio atau Hensa, menyoroti keputusan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saat menghadiri Rakorda DPD PSI Kota Bandung, Jawa Barat, pada 26 September 2026.

Jokowi saat itu menunjukkan KTA PSI bernomor keanggotaan S337220257777777. Momentum tersebut dinilai Hensa memiliki makna politik, terutama karena Bandung berada di Jawa Barat yang selama ini menjadi salah satu basis dukungan elektoral Prabowo Subianto.

Menurut Hensa, pemilihan Bandung sebagai lokasi Jokowi secara terbuka menunjukkan keanggotaannya di PSI bukan sekadar persoalan administratif.

“Kenapa harus di Bandung pengumumannya? Kenapa harus di Jawa Barat? Jadi dia ingin berkomunikasi ke penguasa hari ini, Pak Prabowo, bahwa saya ada di kandang Anda nih,” kata Hensa, Rabu (30/9/2026).

Hensa menyebut Jawa Barat

mempunyai posisi strategis dalam peta politik nasional karena menjadi salah satu wilayah dengan dukungan kuat kepada Prabowo pada Pemilu 2024.

Karena itu, menurut dia, keputusan Jokowi memperlihatkan KTA PSI di Bandung dapat dibaca sebagai bentuk komunikasi politik kepada pemerintahan Prabowo.

“Ingat lho, Jawa Barat itu kandangnya Pak Prabowo,” ujarnya.

Jika Ingin Berhadapan dengan PDIP, Mengapa Bukan Solo?

Hensa kemudian membandingkan pilihan Bandung dengan Solo atau Jawa Tengah, wilayah yang selama ini sangat lekat dengan perjalanan politik Jokowi.

Menurutnya, jika Jokowi ingin mengirimkan pesan politik yang berkaitan dengan PDI Perjuangan dan Megawati Soekarnoputri, Solo atau Jawa Tengah akan memiliki simbol politik yang berbeda.

“Kalau dia mau berhadapan dengan PDI Perjuangan atau Megawati, dia umumkan di Jawa Tengah. Tapi kenapa dia enggak umumkan di Solo?” kata Hensa.

Dia menilai pengumuman



di Solo kemungkinan memiliki efek politik yang berbeda dibandingkan dengan memilih Jawa Barat.

“Kalau dia umumin di Solo, pasti dampaknya enggak besar. Tapi ini Jawa Barat, kandangnya Prabowo,” lanjutnya.

Jokowi: Momentum Memang Sekarang

Sebelumnya, Jokowi menjelaskan bahwa dirinya memang telah menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025. Namun, kartu keanggotaan tersebut baru ditunjukkan secara terbuka pada September 2026.

Jokowi mengatakan keputusan memperlihatkan KTA tersebut berkaitan dengan momentum yang menurutnya sudah tepat.

“Banyak yang bertanya kok baru ditunjukkan sekarang, ya kan suka-suka saya dong, kan ini kartu milik saya,” ujar Jokowi di Bandung.

Dia menambahkan bahwa Bandung dan Bekasi dipilih sebagai lokasi untuk menunjukkan KTA karena momentum politiknya dinilai sudah tepat.

“Bahwa saya tunjukkan di Bandung dan Bekasi ini karena momentumnya memang sekarang,” kata Jokowi.

Pernyataan Jokowi tersebut memberikan konteks bahwa waktu dan lokasi penunjukan KTA memang dipilih setelah dirinya secara resmi tercatat sebagai anggota PSI sejak Oktober 2025. ● (Agus)

Listyo Sigit Dikabarkan Masuk Kabinet Prabowo, Puan: Tanya Presiden Prabowo

JAKARTA | **Harian Merdeka**

DPR RI Puan Maharani angkat bicara mengenai kabar Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bakal masuk ke dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah tidak lagi menjabat sebagai Kapolri.

Puan memilih tidak berspekulasi mengenai kemungkinan tersebut. Menurutnya, keputusan mengenai posisi Listyo Sigit setelah pergantian Kapolri merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

“Kemudian apakah (Listyo Sigit) akan bergabung atau tidak, itu nanti bisa ditanyakan kepada Presiden karena itu hak prerogatif Presiden,” kata Puan



dalam konferensi pers seusai rapat paripurna DPR, Kamis (1/10/2026).

Isu Listyo Sigit masuk kabinet mencuat bersamaan dengan proses pergantian pucuk pimpinan Polri. Presiden Prabowo mengusulkan Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri untuk menggantikan Listyo Sigit.

Usulan tersebut disampaikan melalui Surat Presiden Nomor R57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026. DPR kemudian memproses pencalonan Suyudi melalui Komisi III.

Komisi III DPR menyetujui Suyudi sebagai calon Kapolri setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan pada Kamis pagi. Persetujuan tersebut kemudian dibawa ke rapat paripurna DPR.

Dalam rapat paripurna, DPR secara resmi menyetujui pengangkatan Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Listyo Sigit Prabowo.

Puan yang memimpin rapat juga menyampaikan bahwa setelah proses persetujuan DPR, Suyudi akan segera dilantik

Presiden Prabowo.

“Insyaallah setelah zuhur calon Kapolri akan segera dilantik oleh Bapak Presiden,” ujar Puan.

Dengan demikian, posisi Listyo Sigit sebagai Kapolri memasuki tahap pergantian. Namun, hingga pernyataan Puan disampaikan, belum ada konfirmasi resmi mengenai jabatan baru yang akan diberikan kepada mantan Kapolri tersebut.

Kabar mengenai kemungkinan Listyo Sigit bergang ke pemerintahan Prabowo masih berada pada ranah isu.

Puan menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan kewenangan Presiden. ● (Agus)

Penyidikan Rampung, Kejati Banten Segera Tetapkan Tersangka Korupsi PT ABM

SERANG | **Harian Merdeka**

Penyidikan awal dugaan korupsi pengelolaan keuangan di PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) tahun 2022-2024 hampir rampung. Penyidik kini tinggal menunggu hasil audit kerugian negara sebelum menetapkan tersangka.

“Penyidikannya sudah 99 persen, tinggal audit kerugian negara baru setelah itu penetapan tersangka,” ujar Kepala Seksi Penyidikan Kejati Banten, Devitra Romiza saat ditemui di ruang kerjanya, Dikutip dari Radarbanten.co.id Senin 28 September 2026.

Penyidikannya sudah 99 persen, tinggal audit kerugian negara baru setelah itu penetapan tersangka.

Devitra Romiza
Kepala Seksi Penyidikan Kejati Banten,

Untuk mempercepat audit, penyidik diakui Devitra terus berkoordinasi dengan auditor. Hasil koordinasi terakhir, auditor meminta dihadirkan saksi untuk diwawancara.

“Kita saat ini masih koordinasi, kemarin pihak auditor meminta agar saksi dihadirkan



untuk diwawancara. Ada yang perlu dikonfirmasi,” tegasnya.

Hasil audit tersebut ditegaskan Devitra menjadi dasar penyidik untuk penetapan tersangka dalam perkara korupsi. Ia menyebut pihaknya telah mengantongi calon tersangkanya.

“Sudah ada (calon tersangka-red), tapi harus ada hasil audit dulu. Kita harus matangkan penyidikan ini, nanti disampaikan (identitas tersangka-red),” katanya.

Devitra juga mengatakan, pihaknya telah merampungkan pemeriksaan saksi dan ahli dalam perkara dugaan korupsi yang terjadi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Banten tersebut. Total saksi dan ahli diperiksa berjumlah 22 orang.

“Pekan lalu kita periksa saksi dari pihak eksternal PT ABM, yang bersangkutan kita periksa di Lombok,” katanya.

Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Banten, Jonathan Suranta Martua mengatakan, fokus penyidikan perkara tersebut berkaitan dengan kegiatan bisnis, kerjasama serta laporan keuangan yang ada di PT ABM.

Diduga, terdapat pengelolaan keuangan yang diduga tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) internal perusahaan.

“Ada dugaan pengelolaan keuangan PT ABM yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah,”

ungkapnya.

Ia membenarkan dalam penyidikan perkara itu terdapat kegiatan program Banten Berkurban pada tahun 2023. Program itu merupakan kerjasama antara PT ABM dengan PT Agro Niaga Global (ANG) dan Jawara Farm.

“Ya, di dalamnya ada program Banten berkurban (yang diselidiki-red),” ungkapnya.

Pada awal proses penyidikan, penyidik diakui Jonathan telah menggeledah kantor PT ABM yang berlokasi di Ruko Sukses, Jalan Kyai Haji Abdul Latif, Kota Serang.

Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita sekitar 90 bundel dokumen penting serta barang bukti elektronik berupa satu unit CPU yang diduga berkaitan dengan penyidikan.

“Dokumen dan barang bukti elektronik tersebut selanjutnya dianalisis untuk memperkuat pembuktian dalam proses penyidikan perkara dugaan korupsi tersebut,” katanya.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, Jonathan menyebut telah terjadi dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan PT ABM selama periode 2020 hingga 2024.

Dalam praktiknya, perusahaan milik Pemprov Banten ini diduga tidak mempedomani ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018. **(Egi)**



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN

Jalan Perintis Kemerdekaan, Kavling. 5, Kota Tangerang 15117, Telp. (021) 5523272 Email: Kot-Tangerang@atrptn.go.id

PENGUMUMAN
(Tentang Sertipikat Hilang)
Nomor : 78-79/DI304-28.05/IX/2026

Untuk mendapatkan Sertipikat yang baru sebagai pengganti Sertipikat yang Hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan ini diumumkan bahwa :

No.	Nama / Alamat Pemohon	1. Jenis dan Nomor Hak 2. GS/SU Nomor/Tahun 3. Luas M2	NIB	Terdaftar Atas Nama	Tanggal Pembukuan	Letak Tanah a. Jalan/Blok b. Kelurahan c. Kecamatan	KETERANGAN
1.	TARIANI Pertanian Raya RT 004 RW 004 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta	1. HM: 4324 2. SU. 03746/2019 Tanggal 22/07/2019 3. Luas 70 M ²	05711	Tariani	28-12-2023	a. – b. Paninggilan Utara c. Ciledug	1. Pernyataan dibawah Sumpah/Janji tanggal 23/09/2026 2. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resor Metro Tangerang Kota No. L/GANGGUAN/B/194/V II/2026/SPKT/POLRES METRO TANGERANG KOTA/POLDA METRO JAYA Tanggal 09/07/2026
2.	SURADI Jl. Kedondong RT 004 RW 006 Kelurahan Sudimara Jaya, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten	1. HM: 3071 2. SU. 1623/SUDIMARA TJMUR/2017 Tanggal 06/12/2017 3. Luas 33 M ²	04230	Suradi	09-12-2017	a. – b. Sudimara Timur c. Ciledug	1. Pernyataan dibawah Sumpah/Janji tanggal 23/09/2026 2. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resor Metro Tangerang Kota No. L/GANGGUAN/B/310/IX/2025/SPKT/POLRES METRO TANGERANG KOTA/POLDA METRO JAYA Tanggal 22/09/2025

Bagi siapa saja yang merasa keberatan atas pengumuman ini, maka dapat mengajukan keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat, Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan tersebut diatas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan melalui proses yang berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi

Tangerang, 30 September 2026
An. Kepala Kantor Pertanahan
Kota Tangerang
Kepala Seksi Wilayah V

Ttd.

Jufry Jackson Fernando Siwu, S.H
NIP. 19810706 200903 1 004

Tambang Batu Bara Ilegal di Bojongmanik Dibongkar Ditreskrimsus Polda Banten

LEABK | **Harian Merdeka**

Ditreskrimsus Polda Banten membongkar aktivitas penambangan batu bara ilegal di Kampung Songak Sabrang, Bojongmanik, Kabupaten Lebak. Seorang pria berinisial PU ditetapkan sebagai tersangka.

Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea menyampaikan bahwa kasus ini terbongkar setelah pihak kepolisian menerima laporan adanya praktik tambang ilegal. Polisi kemudian mengecek lokasi tambang dan menemukan beberapa barang bukti.

“Ditreskrimsus Polda Banten melakukan pengecekan terhadap kegiatan penambangan batu bara pada Selasa, 29 September tahun 2026. Dari hasil pengecekan, kegiatan penambangan tersebut dilakukan tanpa dilengkapi izin pertambangan dan menggunakan satu unit alat berat jenis ekskavator merek Kobelco,” ujarnya pada

Kamis (1/10/2026).

Maruli menyampaikan batu bara yang dihasilkan dijual kepada pihak luar dengan nilai Rp 500 ribu per ton. Kegiatan tersebut berlangsung sejak 19 September 2026.

“Dengan jumlah yang telah terjual sekitar 56 ton,” jelasnya. Barang bukti yang ditemukan di lokasi adalah alat berat ekskavator, karung batu bara hasil pertambangan, dan satu unit telepon genggam.

“Atas perbuatannya, tersangka PU dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp 200 juta,” terangnya.

Maruli mengimbau masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan

informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana pertambangan batu bara tanpa izin.

“Apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana pertambangan batu bara tanpa izin, silakan sampaikan kepada

kami, sehingga dapat dilakukan pengecekan dan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga dapat menghubungi Call Center Polri 110 untuk menyampaikan informasi atau laporan,” ucapnya.

● (Egi)



Ditreskrimsus Polda Kaltara Usut Kasus Penimbunan BBM Bersubsidi



TANJUNG SELOR |
Harian Merdeka

Merdeka - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan gelar perkara serta serah terima tersangka dan barang bukti terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

“Unit Reserse Mobil (Resmob) Sub Direktorat (Subdit) III Kejahatan dengan Kekerasan (Jatan-

ras) Ditreskrim, Minggu (27/9) sekitar pukul 11.00 WITA melaksanakan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi,” ujar Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrim) Polda Kaltara Kombes Pol Yudhistira Midyahwan, di Tanjung Selor, Senin.

Gelar perkara dan penyerahan tersangka tersebut, kata Kombes Pol Yudhistira, dilaksanakan di Ruang Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Kaltara dan

merupakan tindak lanjut penanganan perkara sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/A/19/IX/2026/SPKT.DITRESKRIMSUS/POLDA KALTARA.

“Dalam perkara tersebut, dua orang yang diduga terlibat, yakni berinisial Y (24) dan A (71), diserahkan bersama barang bukti kepada pihak yang menangani perkara untuk proses hukum lebih lanjut,” katanya.

Adapun barang bukti yang diamankan, jelasnya, berupa 18 buah jeriken, terdiri dari 17 jeriken berisi BBM jenis Pertalite. Dari 18 jeriken, lanjutnya, ada 16 jeriken berkapasitas 30 liter yang masing-masing berisi sekitar 20 liter Pertalite.

Sedangkan dua jeriken berwarna putih berkapasitas 20 liter, dengan satu jeriken kosong dan satu jeriken berisi Pertalite. Selain itu, turut diamankan satu unit mobil Toyota Rush warna silver metalik dengan nomor

polisi KT 1442 GM.

“Penanganan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan dengan cara memperoleh, menimbun, atau memperdagangkan BBM bersubsidi secara tidak sesuai ketentuan,” ungkapnya.

Para terduga pelaku, kata dia, dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Yudhistira Midyahwan menegaskan, Polda Kaltara memastikan proses penegakan hukum penindakan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan serta penanganan perkara selanjutnya dilakukan oleh pihak terkait sesuai kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku. ● (Egi)

NIKEN ANJANI, BAHAGIA SAAT UMROH

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Pertama-tama Niken Anjani tiba di Madinah. Ia ber-swafoto di bawah rindangnya payung-payung raksasa Masjid Nabawi. Pesona cantiknya begitu terpancar memakai busana muslimah lengkap dengan hijab.

Niken Anjani mengaku merasakan kebahagiaan bisa ke Tanah Suci. "Malam Minggu terbaik dan paling terasa seperti mimpi bagiku. Subhanallah,"

► Niken Anjani lalu sampai di Mekah. Ia berdiri di pelataran Tawaf di hadapan Ka'bah dan Zamzam Tower yang megah di malam hari. Ia tampak tenang dan bersahaja dalam balutan busana ihram serba putih.

Niken Anjani mengaku merasakan kebahagiaan bisa ke Tanah Suci. "Malam Minggu terbaik dan paling terasa seperti mimpi bagiku. Subhanallah,"





TEI 2026 Diburu Buyer dari 113 Negara, 1.533 Eksportir Siap Tawarkan Produk Indonesia

TANGERANG |
Harian Merdeka

Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 tahun 2026 mulai menunjukkan geliat kuat menjelang pelaksanaannya. Hingga akhir September 2026, buyer internasional dari 113 negara telah mendaftarkan diri untuk menghadiri ajang perdagangan terbesar Indonesia tersebut.

Di sisi lain, sebanyak 1.533 pelaku usaha Indonesia, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), telah mendaftar sebagai ekshibitor.

TEI 2026 akan berlangsung pada 14-18 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Puntodewi, mengatakan tingginya jumlah negara asal buyer dan pelaku usaha yang mendaftar menunjukkan besarnya minat terhadap TEI sebagai platform bisnis business-to-business (B-to-B).

"Banyaknya negara asal buyer dan ekshibitor yang mendaftar jelang TEI 2026 menunjukkan tingginya minat pelaku usaha mancanegara dan lokal

untuk bertemu di platform business-to-business (B-to-B)," ujar Puntodewi dalam konferensi pers Technical Meeting TEI ke-41 di ICE BSD City, Rabu (30/9/2026).

Menurut dia, TEI 2026 diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi pelaku usaha Indonesia untuk menembus pasar global, membuka pasar baru, sekaligus memperluas jejaring bisnis internasional.

Buyer India Terbanyak
Dari 113 negara yang telah mendaftarkan buyer, India menjadi negara dengan jumlah buyer terbanyak. Posisi berikutnya ditempati Tiongkok, Nigeria, Malaysia, dan Mesir.

Kementerian Perdagangan menyebut tingginya partisipasi buyer internasional tidak terlepas dari dukungan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), serta perwakilan perdagangan RI di berbagai negara.

Jaringan perwakilan RI tersebut aktif memperluas jejaring perdagangan sekaligus menjaring buyer potensial yang dinilai memiliki peluang kerja sama dengan pelaku usaha Indonesia.

Sementara itu, 1.533

ekshibitor Indonesia akan menampilkan produk dan jasa dalam lima zona utama.

Zona Food, Beverage, and Agriculture Products menjadi kategori terbesar dengan 754 ekshibitor. Berikutnya Fashion and Handicraft sebanyak 448 ekshibitor, Manufactured Products and Services sebanyak 183 ekshibitor, Furniture and Home Decor sebanyak 85 ekshibitor, serta Industrial Estate sebanyak 63 ekshibitor.

Puntodewi mengatakan pembagian berdasarkan zona tersebut dilakukan agar buyer internasional lebih mudah menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Dengan begitu, pembahasan bisnis dengan ekshibitor lokal bisa lebih terarah," katanya.

Bidik Transaksi
USD17,5 Miliar

Mengusung tema "The Ultimate Hub for Global Sourcing", TEI 2026 menempati area pameran seluas 16.656 meter persegi.

Kementerian Perdagangan menargetkan sekitar 1.500 ekshibitor dan 30.000 pengunjung hadir dalam ajang tersebut.

Lebih jauh, TEI 2026 ditargetkan menghasilkan potensi transaksi hingga USD17,5 miliar. ● (Agus)

Kemendag Dorong Desain Jadi Pengungkit Daya Saing Produk Indonesia



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus memperkuat peran desain sebagai salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keberadaan Indonesia Design Development Center (IDDC) yang selama satu dekade menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, desainer, akademisi, asosiasi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan produk berorientasi ekspor.

Satu dekade perjalanan IDDC diperingati melalui acara bertajuk "DASA DAYA: Desain Menguatkan Usaha, Menggerakkan Indonesia" yang digelar di Gedung IDDC, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Fajarini Puntodewi, mengatakan desain tidak semata-mata berkaitan dengan aspek estetika sebuah produk. Menurutnya, desain memiliki posisi strategis dalam meningkatkan nilai tambah produk sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Desain bukan sekadar urusan estetika, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk dan memajukan perekonomian. Intervensi desain harus memberi dampak ganda yang secara mikro mendorong pelaku usaha untuk naik kelas dan secara makro menggerakkan ekonomi Indonesia," ujar Puntodewi.

Selama satu dekade, IDDC telah menjalankan berbagai program pengembangan desain bagi pelaku usaha. Di antaranya pendampingan desain produk secara langsung melalui Designers Dispatch Service (DDS) dan Klinik Desain, serta fasilitasi ke kompetisi desain internasional Good Design Indonesia (GDI) di Jepang.

Desain Jadi Faktor Pembeda Produk Ekspor

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif Kemendag, Deden Muhammad Fajar Shiddiq, menegaskan bahwa desain merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia. ● (Agus)



Demo Bea Cukai Merak, CDC Tuntut Kepala Kantor Mundur & Bongkar Aktor Rokok Ilegal

CILEGON | **Harian Merdeka**

Creative Democracy Center (CDC) Forum Mahasiswa dan Pemuda menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Merak, Rabu (30/10/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap persoalan peredaran rokok ilegal yang masih ditemukan melalui jalur Merak-Bakauheni.

CDC menilai persoalan rokok ilegal di Banten tidak boleh berhenti pada penindakan terhadap barang maupun pelaku lapangan. Sebab, pada 11 Juni 2026, Kanwil Bea Cukai Banten bersama Bea Cukai Merak menggagalkan peredaran 8.262.000 batang rokok ilegal dengan nilai sekitar Rp12,68 miliar dan potensi kerugian negara sekitar Rp7,9 miliar. Dalam kasus tersebut, Bea Cukai dan Polri menyatakan akan melakukan pendalaman untuk menelusuri pemilik, pemasok, maupun pemodal di balik penyelundupan tersebut.

Direktur Eksekutif Creative Democracy Center, Wildan, mengatakan bahwa besarnya jumlah rokok ilegal yang berhasil ditindak menunjukkan perlunya evaluasi terhadap rantai distribusi secara menyeluruh.

"Kami tidak ingin pemberantasan rokok ilegal hanya berhenti pada sopir, kurir atau barang bukti. Yang harus dibongkar adalah jaringan di belakangnya. Siapa pemasoknya, siapa pemodalnya, siapa pengendalinya, dan apakah ada pihak yang memberikan perlindungan. Kalau dalam proses penyelidikan ditemukan aktor intelektual, maka harus diusut dan diproses berdasarkan hukum," tegas Wildan.

CDC juga menyoroti data penindakan Bea Cukai Merak sepanjang Januari hingga Juli 2026 yang dilaporkan mencapai sekitar 52 juta batang rokok ilegal. Data tersebut semakin memperkuat desakan CDC agar sistem pengawasan di jalur Merak dievaluasi secara menyeluruh, termasuk pengawasan terhadap jalur pelabuhan, jalur darat, gudang penyimpanan dan perusahaan jasa titipan.

Menurut CDC, penindakan yang dilakukan aparat patut diapresiasi, tetapi keberhasilan pemberantasan tidak semata-mata diukur dari jumlah barang yang disita. Pertanyaan publik yang lebih mendasar adalah apakah jaringan yang memasok dan mengendalikan distribusi rokok ilegal tersebut benar-benar berhasil dibongkar. **● (Egi)**

Wagub Hellyana Resmi Diberhentikan Sementara



BANGKA BELITUNG |
Harian Merdeka

Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hellyana, resmi diberhentikan sementara dari jabatannya menyusul perkara hukum yang menjeratnya terkait dugaan penggunaan ijazah dan gelar akademik sarjana palsu.

Pemberhentian sementara tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 102/P Tahun 2026.

Keppres tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 23 September 2026.

Keputusan pemberhentian sementara ini menjadi konsekuensi administratif atas proses hukum yang sedang dihadapi Hellyana. Status tersebut berbeda

dengan pemberhentian tetap karena proses hukum terhadap perkara yang bersangkutan masih berjalan.

Kasus ini sebelumnya menjadi perhatian setelah muncul dugaan penggunaan dokumen akademik yang dipersoalkan keabsahannya.

Dugaan tersebut kemudian masuk ke ranah hukum dan menjadi dasar bagi proses lebih lanjut terhadap Hellyana.

Dengan terbitnya Keppres tersebut, posisi Hellyana sebagai Wakil Gubernur Babel untuk sementara tidak dijalankan sampai terdapat perkembangan hukum lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberhentian sementara ini juga menambah babak baru dalam polemik mengenai keabsahan do-

kumen pendidikan yang digunakan oleh pejabat publik.

Terlebih, gelar akademik dan dokumen pendidikan menjadi bagian penting dalam persyaratan pencalonan serta legitimasi seseorang yang menduduki jabatan pemerintahan.

Namun demikian, dugaan penggunaan ijazah dan gelar akademik palsu tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum. Status pemberhentian sementara tidak dengan sendirinya berarti bahwa Hellyana telah dinyatakan bersalah.

Perkembangan perkara dan putusan lembaga peradilan nantinya akan menjadi dasar penting untuk menentukan konsekuensi hukum maupun administratif selanjutnya terhadap posisi Hellyana.

● (Agus)

Geger ICM Tangsel! Guru Diduga Lecehkan Siswi Selama 3 Tahun, Menteri PPPA Tegaskan Tidak Ada Toleransi

TANGERANG SELATAN |
Harian Merdeka

Dugaan kekerasan seksual terhadap seorang siswi di Sekolah Insan Cendekia Madani (ICM), Tangerang Selatan, memicu perhatian serius pemerintah.

Kasus tersebut bahkan mendapat sorotan langsung dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi.

Yang membuat kasus ini menjadi perhatian, dugaan kekerasan tersebut disebut berlangsung dalam rentang 2023 hingga 2026, ketika korban masih berada di jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama.

Berdasarkan informasi penyidikan, terduga pelaku merupakan seorang guru yang pernah menjadi wali kelas korban. Terduga pelaku kini telah dinonaktifkan dan perkara tersebut telah dilaporkan kepada Polres Tangerang Selatan.

Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan, dugaan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sebagai persoalan internal sekolah.

"Kekerasan dalam lingkungan pendidikan tidak dapat ditoleransi. Sekolah harus menjadi ruang yang aman bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan berkembang," kata Arifah, Rabu (30/9/2026).

Negara Pastikan Korban Tak Sendirian

KAPOLRI BARU

"Kritik dan keluhan publik masih kita terima. Bagi saya, hal itu bukan sesuatu yang harus ditutupi," kata Suyudi saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI, kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (1/10).

Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI itu, transformasi Polri, baik secara struktural, instrumental maupun terutama kultural, bukan pekerjaan yang mudah.

Namun, pembenahan perlu dilanjutkan dengan keberanian melihat kekurangan institusi secara jernih, sekaligus men-



Kementerian PPPA telah berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Tangerang Selatan, penyidik, serta keluarga korban.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan, baik secara hukum maupun psikologis.

Korban diketahui telah mendapatkan layanan dari psikolog klinis. Hasil pendampingan menunjukkan korban masih membutuhkan dukungan psikologis lebih lanjut.

Selain itu, korban telah menjalani visum dan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di RSU Serpong Utara.

Arifah menegaskan, proses penanganan kasus tidak boleh hanya berorientasi pada aspek hukum. Pemulihan korban juga harus menjadi perhatian utama.

Pendampingan, kata dia, harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan tenaga pro-

fesional, UPTD PPA, keluarga, serta aparat penegak hukum.

"Korban tidak boleh menghadapi situasi ini sendirian," tegasnya.

Sekolah Harus Jadi Ruang Aman, Bukan Ruang yang Menakutkan

Kasus tersebut kembali menyoroti pentingnya sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan.

Sekolah semestinya menjadi tempat anak mendapatkan pendidikan sekaligus perlindungan.

Ketika dugaan kekerasan justru muncul dari lingkungan yang seharusnya memberikan rasa aman, mekanisme pengawasan dan pencegahan kekerasan menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.

Namun, proses hukum tetap harus berjalan secara objektif.

Dugaan terhadap terlapor harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan mekanisme hukum yang berlaku.

Di sisi lain, kepentingan dan

keselamatan korban anak harus menjadi prioritas.

Pendampingan psikologis juga diperlukan agar proses hukum tidak semakin menambah beban yang harus ditanggung korban.

Menteri PPPA Ingatkan Jangan Sebar Identitas Korban

Arifah juga memberikan peringatan keras kepada seluruh pihak agar tidak menyebarkan identitas korban.

Ia meminta masyarakat, media, maupun pihak-pihak yang mengetahui kasus tersebut tidak menyebarkan foto, nama, maupun informasi pribadi yang dapat membuat korban teridentifikasi.

"Kami mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga kerahasiaan identitas dan informasi pribadi korban serta tidak menyebarkan foto atau informasi yang dapat mengungkap identitas anak," ujar Arifah.

Pemerintah memastikan akan mengawal kasus tersebut mulai dari proses penanganan hukum, pendampingan keluarga, pemenuhan akses layanan bagi korban, hingga pemulihan.

Kasus dugaan kekerasan seksual ini kini menjadi ujian penting bagi seluruh pihak untuk memastikan bahwa sekolah benar-benar menjadi ruang aman bagi anak, sekaligus memastikan proses hukum berjalan transparan, profesional, dan tetap melindungi korban.

● (Agus)

jaga dan memperluas berbagai capaian yang telah dibangun para pendahulu.

Suyudi juga memandang keberadaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai momentum penting untuk mempercepat pembenahan institusi Polri.

Menurut dia, reformasi tersebut bukan untuk melemahkan Polri, melainkan memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, kualitas pelayanan, serta kedekatan Polri dengan masyarakat.

Komisi Percepatan Refor-

masi Polri dibentuk pada 2025 dan keanggotaannya diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Komisi yang diketuai Jimly Asshiddiqie itu telah menyerahkan laporan akhir dan rekomendasi mengenai pembenahan institusi kepolisian kepada Presiden Prabowo Subianto pada 5 Mei 2026. Sebelumnya, Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi sebagai calon Kapolri

untuk menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Uji kelayakan dan kepatutan tersebut dibuka untuk umum di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, pukul 09.10 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburrahman. Suyudi merupakan calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Prabowo Subianto kepada DPR RI.

Sebelum membuka rapat, Habiburrahman mengatakan pimpinan DPR RI menerima surat dari Presiden mengenai usulan pemberhentian dan pengangkatan Kapolri pada Rabu (30/9). ● (Egi)

EMAS KELIMA

JAKARTA |
Harian Merdeka

Indonesia menambah medali emas di Asian Games 2026. Ada Nurisa Dian Ashrifah yang menjadi juara nomor compound putri individu cabang olahraga panahan.

Nurisa meraih medali emas, disusul Amaya Amparo Cojuangco dari Filipina dengan medali perak dan Kang Yeonsoo dari Korea Selatan dengan medali perunggu. Ketiganya tercatat sebagai

tiga peraih medali nomor compound putri.

Tambahan tersebut membuat Indonesia kini mengoleksi lima medali emas di Asian Games 2026.

Berdasarkan klasemen medali di situs resmi Asian Games 2026, In-

donesia juga telah mengumpulkan 7 perak dan 20 perunggu. Dengan demikian, total koleksi Merah Putih mencapai 32 medali.

Emas Nurisa menjadi tambahan terbaru Indonesia pada Kamis (1/10/2026). Sebelumnya, Merah Putih telah mengamankan medali emas dari bulutangkis, angkat besi, dan panjat tebing.

Dengan tambahan emas dari Nurisa, Indonesia kini berada di posisi ke-13 klasemen medali Asian Games 2026. ● (hmi)



terbit setiap sore Senin s/d Sabtu

HARIAN MERDEKA
aspirasi rakyat

Langganan ePaper...

Dapatkan berita terkini setiap sore langsung di perangkatmu.

Hanya **Rp50.000/bulan** Hubungin **Alan Oskar : +62 895-2285-1963**

